

---

---

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM  
PENANGANAN KEMISKINAN DI DESA PERADONG KECAMATAN  
SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT**

*Keristina*

Universitas Bangka Belitung  
Email: keristina268@gmail.com

**Abstrak**

Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur yang ada melalui juknis dan pedoman PKH. Untuk menentukan keluarga mana yang layak mendapatkan bantuan melalui verifikasi dahulu dari data pusat, lalu kemudian ditentukan oleh perangkat desa serta pendamping desa dalam musyawarah desa yang dilaksanakan setiap ada pemberitahuan dari pusat. Setelah data didapatkan, dan telah melalui musyawarah desa, kemudian ketua RT, RW juga Kadus bergerak mendata keluarga yang layak menerima bantuan PKH. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menangani kemiskinan di Desa Peradong. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menangani kemiskinan, agar kemudian bisa menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi David C. Korten.. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Program Keluarga Harapan (PKH) mampu menekan angka kemiskinan dengan diberikan pemahaman terkait kualitas hidup yang lebih baik terhadap KPM. Bentuk dukungan dan hambatan terletak pada kerja sama serta komunikasi antar pelaksana dengan KPM.

**Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan**



***Abstract***

***Implementation of the Family Expectancy Program in Handling Poverty in Peradong Village, Simpang Teritip Sub-District, Wes Bangka District***

***By***

***Keristina***

*The process of implementing the Family Expectancy Program (FEP) is carried out in accordance with existing procedures through the technical guidelines and FEP guidelines. To determine which families are eligible for assistance through verification first from central data, then determined by village officials and village assistants in village deliberations which are held every time there is a notification from the center. After the data is obtained, and has gone through village deliberations, then the head of the RT, RW and Kadus move to record families who are eligible to receive FEP assistance. Therefore, this study examines the implementation of the Family Expectancy Program (FEP) in dealing with poverty in Peradong Village. the purpose of this study is to look at the implementation process of the Family Expectancy Program (FEP) in dealing with poverty, so that later it can create a better quality of life. The theory used in this research is David C. Korten's implementation. The results of this study indicate that the existence of the Family Expectancy Program (FEP) is able to reduce poverty by providing understanding related to a better quality of life for KPM. Forms of support and obstacles lie in cooperation and communication between implementers and KPM.*

**Keywords: Implementation, Family Expectancy Program, Poverty**

## PENDAHULUAN

Menurut Dirjen PMD Depdagri dalam Parnamian, (2010), kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan yang beragam ditandai oleh rendahnya rata-rata kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan, gizi anak-anak dan sumber air minum.

Beban kemiskinan sangat dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-anak yang berakibat pada terancamnya

masa depan oleh karena kekurangan gizi, dan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan Simanjuntak, (2010). Masyarakat desa Peradong juga mengalami masalah ekonomi baik dalam lingkup kesehatan dan pendidikan. Tingginya angka *stunting* terjadi pada bayi dan anak-anak dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai cara merawat bayi dan anak, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, tingginya pernikahan dini dan kentalnya kultur budaya setempat mengenai pola asuh orangtua dahulu.

Hal ini sangat berkaitan dengan sebab kemiskinan yang terjadi di Desa Peradong. Semakin tingginya angka *stunting* akan memengaruhi pola kehidupan sebuah keluarga. Banyaknya kebutuhan tersebut, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu aspek kebutuhan, salah satunya dalam memenuhi kebutuhan gizi untuk keluarga dan anak-anaknya. Selain rendahnya pengetahuan, juga pekerjaan yang hanya bergantung kepada alam tidak selalu berhasil hingga mensejahterakan pemiliknya.

Tingginya angka *stunting* tentu menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Desa Peradong dalam hal pemenuhan gizi bagi anak tidak bisa terpenuhi. Untuk target Nasional di tahun 2022 maksimal 18 persen, namun secara keseluruhan untuk Kabupaten Bangka Barat berada di 11,1 persen. Camat Simpang Teritip, Syamsuri juga berharap berupaya menurunkan tingkat *stunting* di Desa Peradong menurun walaupun tidak secara drastis tetapi setidaknya ada penurunan ditahun 2022. Tingginya kasus *stunting* di Kecamatan Simpang Teritip, diakuinya dikarenakan pola hidup bahkan untuk urusan jamban pun menjadi faktor terjadinya *stunting*.

Sementara itu selain masalah jamban, pola hidup yang kurang sehat juga masalah pernikahan dini menjadi alasan banyaknya *stunting* terhadap anak (BangkaPos, 27/01/2022).

No.	Tahun	Jumlah Stunting TB/U DAN BB/U
1.	2020	30 dan 73 Balita
2.	2021	45 dan 47 Balita
3.	2022	55 Balita
4.	2023	50 dan 49 Balita
5.	2024	31 Balita

Tabel 1. Tabel Data *Stunting*

Beberapa faktor ekonomi, sosial dan budaya yang masih sangat melekat

memengaruhi dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Peradong. Faktor ini yang kini menjadi bahan kajian untuk peneliti analisis lebih jauh lagi, agar nanti bisa menemukan benang merah dari sebuah penelitian ini. Membahas sebuah program ini menjadi daya tarik tersendiri, karena hampir membahas semua sektor kehidupan, didalam masyarakat. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya bahkan program ini masih menjadi andalan Negara yang diyakini mampu dalam memberantas angka kemiskinan di Indonesia.

### LANDASAN TEORI

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik pada teori David C. Korten dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2008) yang dipengaruhi elemen penting yakni program itu sendiri, pelaksanaan Program dan kelompok sasaran program. Adapun dari tiga elemen implementasi program menurut (Korten, 1988) dalam (Akib & Antoniu, 2000):

1. Program, menurut Korten harus ada kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
2. Organisasi Pelaksana, menurut Korten (1988) harus ada kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Oleh karena itu, kemampuan implementor merupakan sumberdaya manusia yang juga memengaruhi keberhasilan implementasi.
3. Kelompok sasaran, menurut (Korten, 1988), harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah menganalisis dan fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi terkait fenomena yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif ini, penulis secara luas membahas perkembangan kemiskinan di desa Peradong melalui berbagai sumber data yang ada dan disertai berbagai gagasan yang luas.

Lokasi dalam penelitian ini di Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, adapun alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan desa Peradong terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai desa paling banyak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Seperti yang telah dijelaskan dibagian sebelumnya, fokus kajian penelitian ini adalah pelaksanaan Program Keluarga Harapan serta keluarga penerima manfaat. Informan penelitian adalah orang-orang yang diwawancarai dan ditanyai oleh pewawancara. Menurut Fritz Damanik dalam Siti Nurmalasari (2018), teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan penelitian, Teknik pengumpulan data dengan, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini data berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer, data diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti atau pihak yang berkepentingan., seperti hasil wawancara dengan peneliti. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari Pedoman Program Keluarga Harapan, permensos serta buku dan jurnal skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data bisa dilakukan melalui langkah-langkah analisis pengumpulan data, reduksi data, display data (penyajian data), dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)**

Menurut Friedrich implementasi adalah kebijakan yang mengacu pada tindakan kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mencapai tujuan yang diinginkan sehingga tujuan tersebut bisa tercapai. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan didasarkan pada tahapan juknis dan pedoman PKH sebagai bagian dari aturan yang sudah ada, agar program berfungsi dengan baik sejak Tahun 2017. Program ini diawali dengan adanya masalah kemiskinan yang bersifat struktural didalam masyarakat. Program PKH, diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah melalui program bantuan sosial. Proses pelaksanaannya dilakukan pendataan atau verifikasi data keluarga yang layak mendapatkan bantuan melalui data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari pusat. Data yang sudah ditentukan dari pusat, kemudian diverifikasi kembali oleh perangkat desa yang bertugas yaitu Kadus dan RT setempat. Pendataan dilakukan kerumah- rumah masyarakat dan mensurvei setiap rumah jika layak atau tidaknya mendapatkan bantuan. Survei kerumah masyarakat dilakukan secara terus menerus dengan pedoman data DTKS Dari pusat dan juga kelayakan hidup masyarakat yang meningkat menjadi lebih baik.

Setelah dilakukan verifikasi atau pendataan jumlah keluarga yang layak mendapatkan bantuan selanjutnya dilakukan musyawarah antara perangkat desa dan pendamping PKH desa Peradong untuk menentukan keluarga mana yang berhak mendapatkan bantuan. Selama musyawarah berlangsung, setiap orang memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tentang apakah mereka ingin menyebutkan nama keluarga yang berhak atas bantuan. Setelah nama disampaikan, perundingan kembali dilakukan untuk mencapai konteks. Musyawarah tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan apakah keluarga layak mendapatkan bantuan atau tidak. Misalnya, jika sebuah keluarga memiliki kemampuan untuk mengurangi status miskin keluarganya, keluarga tersebut dapat dibebaskan dari PKH sebagai Penerima Manfaat atas dasar kesepakatan bersama dalam musyawarah.

#### **1. Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan merupakan sebuah bantuan sosial yang diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diluncurkan sejak Tahun 2007 sebagai salah satu program Nasional penanggulangan kemiskinan hingga Tahun 2022 telah menjangkau 514 Kabupaten/Kota pada 37 Provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan peraturan yang ada pada saat itu. Setiap pelaksanaan program ini tentu saja melihat dulu keadaan perekonomian masyarakat

setempat. Walaupun data yang demikian tetap masih dari rujukan data pusat, tapi pemerintah desa dan Pendamping PKH juga ikut andil dalam menentukan masyarakat yang dalam keadaan perekonomian kurang baik. Dikatakan perekonomian yang kurang baik, bukan berarti juga sebuah keluarga tidak mampu untuk keluar dari ketidakstabilan perekonomian. Hanya saja untuk menstabilkan sebuah perekonomian keluarga didukung juga oleh sumber daya alam memadai.

## 2. Organisasi Pelaksana

Melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pendamping PKH, para pendamping juga berkoordinasi dengan perangkat desa. Sebagai contohnya dalam proses penentuan anggota PKH. Pada pertemuan awal, pendamping PKH menjalin kerjasama dengan perangkat desa untuk mendata (verifikasi) keluarga yang kurang mampu. Verifikasi ini berdasar data dipusat sehingga pihak pendamping PKH hanya harus validasi data saja. Selain berkoordinasi dengan pihak desa, pendamping PKH juga membentuk ketua kelompok PKH untuk membantu tugas- tugasnya. Pembentukan ketua kelompok adalah berdasarkan sikap tanggap dan fleksibelnya. Ini sangat berguna dalam kelangsungan pelaksanaan PKH. Selain itu, kewajiban para pendamping PKH dalam hal penerimaan pengaduan keluhan anggota PKH. Proses pengaduan keluhan anggota PKH sudah sangat efektif dilakukan. Keluhan dari anggota PKH akan disampaikan langsung kepada ketua kelompok PKH yang selanjutnya akan disampaikan ke pendamping PKH. Selanjutnya pendamping PKH akan memberikan solusi-solusi atas keluhan-keluhan yang ada.

## 3. Kelompok Sasaran

Sudut pandang ini berkaitan dengan sejauh mana bantuan yang diberikan pihak pusat (pemerintah), apakah benar-benar sudah memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup bagi kelompok sasaran. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan selama penelitian, manfaat PKH sangat besar dirasakan oleh semua peserta PKH. Yakni dapat meringankan biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan terbantunya dalam meringankan biaya, maka para orangtua semangat untuk menyekolahkan anaknya, datang ke posyandu dan juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup para lansia.

Sebagai salah satu sebuah program bantuan sosial bersyarat Program Keluarga Harapan memiliki indikator penerima manfaat diantaranya, keluarga penerima manfaat ibu hamil dan anak usia dini dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan dan anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan maksimal 12 tahun masa pembelajaran, para penyandang disabilitas dan juga lanjut usia dengan tujuan mempertahankan kesejahteraan sosial hidup.

Jumlah KPM	Tahun
188 KPM	2020
170 KPM	2021
118 KPM	2022
115 KPM	2023
108 KPM	2024

Tabel 2. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat

Dari data tabel diatas bisa disimpulkan, bahwa Keluarga Penerima Manfaat di Desa Peradong mengalami peningkatan dan juga penurunan. Tetapi walaupun mengalami penurunan, angka tersebut tidak memengaruhi tingkat kemiskinan di Desa Peradong. Dilihat dari persentasenya masih saja tetap tinggi diantara desa yang lain. Terlebih lagi, desa Peradong bukanlah desa yang luas dan banyak penduduknya. Jadi adanya penurunan pun tidak ada perubahan sedikitpun terhadap kemiskinan di Desa Peradong.

## **B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**

Dari pelaksanaan program keluarga harapan, juga menemui hambatan dan kendala selama proses pelaksanaannya. Terlebih lagi desa yang masih terkenal cukup kental adat istiadat dan masih sedikit primitif. Pendidikan yang masih kurang tentang pemahaman dunia luar juga menjadi kendala pelaksanaan ini. Berikut ada engambat dan dukungan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

### **1. Faktor penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan**

- a. Pendidikan yang masih rendah menjadi kendala terutama masyarakat yang menerima bantuan, ada yang tidak bisa membaca atau buta huruf sejak kecil, ada sebagian hanya lulus SD dan yang tidak pernah menempuh bangku sekolah. Dalam kasus ini, banyak masyarakat yang tidak bisa membaca dan paham apa yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan. Sehingga dibutuhkan pengawalan yang ekspresif terhadap keberlangsungan program keluarga harapan. Terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat, dilihat dari pendapatan sehari-hari setiap keluarga ada yang sudah layak dan ada yang masih belum layak. Kesenjangan ini juga berdampak terhadap pola pikir masyarakat yang ingin disama ratakan kualitas hidupnya. Sedangkan kemampuan kualitas hidup bergantung dari pendapatan serta pemasukan setiap keluarga. Pengeluaran yang drastis juga disebabkan banyaknya kebutuhan setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- b. Kecemburuan sosial yang tinggi antara masyarakat biasa dengan KPM, misalnya ada keluarga yang dapat bantuan PKH yang sudah lama terdaftar jadi KPM sedangkan yang masyarakat lain tidak dapat lagi atau sudah dicabut karena bisa dikatakan sudah layak sejahtera. Sebenarnya kualitas hidup yang sudah layak sejahtera tidak bisa dikatakan tidak mampu, tetapi individu tersebut mampu memanfaatkan peluang sukses agar bisa keluar dari rantai kemiskinan. Kurangnya pemahaman dimasyarakat, sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara KPM dan masyarakat biasa. Sebagai contoh; masyarakat A menjadi KPM sudah berlangsung lama dan selalu dapat dengan jumlah banyak, itu sudah sesuai ketentuan kategori bantuan, misalnya anaknya masih sekolah, menyusui dan ada keluarga lansia dirumahnya. Setiap kategori berbeda untuk jumlah nominal bantuan yang diterima. Jumlah bantuan pun bisa mencapai jutaan untuk anaknya yang masih duduk dibangku sekolah. Menjelaskan kesalahpahaman ini juga membutuhkan komunikasi yang baik dan bijak terhadap masyarakat.

### **2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**

Kalau ada faktor penghambat tentu juga ada faktor pendukung. Adapun faktor pendukung sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan dari pemerintah desa, dimana untuk menentukan KPM diadakan dahulu musyawarah bersama antara seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, LPM, dan pendamping PKH yang diadakan setiap bulan. Musyawarah ini dilaksanakan sebagai

bentuk kontribusi pemerintah desa dalam mendukung program bantuan sosial dari pemerintahan. pemerintahan. Desa menjadi wadah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk kesuksesan program tersebut,

- b. Komunikasi berjalan dengan baik antara pemerintah desa dengan pendamping PKH, karena pendamping PKH juga bagian dari perangkat desa yang merangkap dua tugas. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, komunikasi menjadi salah satu sumber penting untuk kesuksesan sebuah program, antara pelaku kebijakan harus saling berkoordinasi. Hal ini juga diperuntukan baik semua pelaku kebijakan tanpa terkecuali.
- c. Anggaran yang didistribusikan dari pusat disesuaikan dengan kebutuhan desa yang sudah ditentukan berapa jumlah Keluarga Penerima Manfaat, tidak dikurang atau lebihkan. Anggaran untuk bantuan sosial ini sepenuhnya ditanggung oleh negara, pihak desa bertugas sebagai pihak pengelola anggaran tersebut.

### KESIMPULAN

Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk menentukan keluarga yang mana layak mendapatkan bantuan melalui verifikasi dahulu dari data pusat, lalu ditentukan oleh perangkat desa dan pendamping desa dalam musyawarah desa yang dilaksanakan setiap ada pemberitahuan dari pusat. Setelah data sudah didapatkan, dan telah melalui musyawarah desa, baru ketua RT, RW dan Kadus bergerak mendata warga masyarakat yang layak menerima bantuan PKH. Hal ini dilakukan agar, sebuah program yang diluncurkan sudah tepat sasaran, karena yang menentukan KPM sudah dari daerah setempat. Melalui musyawarah tersebut, juga bisa mengeluarkan siapa yang tidak layak menerima bantuan dan membuat nama baru sebagai penerima manfaat yang baru. Ada juga aplikasi web khusus SDM PKH dari Kemensos yang hanya bisa diakses oleh pelaksana PKH terdapat data penerima bantuan yang sudah stabil perekonomiannya. Hambatan pelaksanaan program ini terutama rendahnya pendidikan masyarakat, kurangnya pemahaman tentang perkembangan zaman, masih terpaut pada budaya ingin selalu menerima bantuan, faktor sumberdaya alam yang kurang memadai untuk sector pertanian karena banyaknya lahan yang berbentuk rawa-rawa, serta bentuk kemiskinan struktural.

Sedangkan dukungan pelaksanaannya berjalan dengan baik karena adanya komunikasi yang baik dari perangkat desa dan pendamping PKH. Juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Program Keluarga Harapan dan pentingnya mengubah pola perilaku untuk tidak selalu mengharapkan bantuan. Pemahaman ini juga direspon baik oleh masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku, skripsi dan jurnal ilmiah

Abdullah Ramdhani & Muhammad Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung Vol.11 No.1

Abdurrahman dan Eddy Suriyani, 2022, *Implementai Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, Kalimantan.

Ali Khomsan dkk, 2015, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Asna Aneta, 2010, *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo Vol.1No. 1

Bustami Rahman & Ibrahim, 2009. *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Pres, Pangkalpinang.

Cita Fauziatul Akmal, 2017, *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Kementerian Sosial RI, Jakarta.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2017, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Kementerian Sosial RI, Jakarta.

Fiolita Nur Wulandari, 2020, *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tagamus*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Khasanah Nur dkk, 2018, *Pengaruh Sumber Daya Dan Disposisi Pelaksanaan Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang*, Universitas Tidar, Magelang Vol.02 No. 02 ISSN:2614-4220

Khaerul Baria, 2019, *Efektivitas Pelayanan Kartu Macca di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.

Kristian Indra, 2022, *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut*, Universitas Alghifari, Bandung Jawa Barat Vol.9 No. 1

Lisa Harrison, 2007, *Metodologi Penelitian Politik*, Kencana, Jakarta. Mahmud Fajrin dkk, 2020, *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang*, Unismuh, Purwokerto.

Palupi Lindiasari S. & Aji Wahyu Ramadhani, 2019, *Efektivitas Bantuan Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan Pendekatan Parametrik*, Universitas Indonesia, Vol. 5 No. 1 ISBN.2502- 6976

Siti Nurmalasari, 2018, *Potensi Konflik di Desa Kundi Bersatu*, Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung.

Sutikno Chamid dkk, 2023, *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*, Musamus Journal of Public Administratios. VOL.5 No. 2, Purwokerto.

### **Undang-undang, Peraturan dan Surat Keputusan:**

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Simter Oktober Desa Peradong Tahun 2020

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Simpang Teritip Desa Peradong Tahun 2022

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Simpang Teritip Desa Peradong Tahun 2024

Program Keluarga Harapan Desa Peradong Data Desember 2021 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 8/3/BS.00.01/1/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

<https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/kkn-stunting-universitas-jember-tuai->

sukses-di-bangka-barat di akses 29 Maret 2022.

<https://m.liputan6.com/hot/read/4566760/7-penyebab-kemiskinan-dan-pengertiannya-menurut-ahli>



